

Indonesia Country Update

March 2014



Selamat berjumpa dalam Indonesia Country Update! Pada edisi ini, kami meninjau kembali portfolio pinjaman Kelompok Bank Dunia untuk Indonesia, proyek baru yang sedang dinegosiasikan dengan pemerintah dan representasi negara ini di Bank Dunia. Tinjauan kembali terhadap Kebijakan Safeguards Bank Dunia yang saat ini sedang berlangsung juga kami tampilkan dalam seksi Spotlight, yang mengulas mengenai relevansi dari tinjauan kembali ini (review) dan kebijakan yang dihasilkan untuk kerja Bank Dunia di Indonesia di masa yang akan datang. Kami juga memperkenalkan kembali dasar dari Program Investasi Kehutanan (FIP) di Indonesia, yang masih menjadi area monitoring penting dalam pendanaan iklim. Rancangan proyek-proyek FIP masih tertunda pelaksanaannya, sementara isu-isu substantif mulai dari reformasi tata kelola kehutanan sampai pendekatan pemangku kepentingan, dan safeguards lingkungan, sosial dan fiduciary tetap menjadi prioritas dalam agenda masyarakat sipil dan jaringan komunitas kehutanan. Pada edisi-edisi selanjutnya kami akan meng-cover secara lebih dalam mengenai FIP, bagaimana program tersebut di gulirkan di ibukota dan daerah REDD+. Dan yang terakhir kami menampilkan inisiatif-inisiatif CSO yang mengenai Bank Dunia dan aktifitas MDB lainnya sehubungan dengan pendanaan iklim dan safeguards. Kami terbuka untuk menerima berita-berita terkait dari teman-teman sekalian untuk dimasukkan dalam updates mendatang.



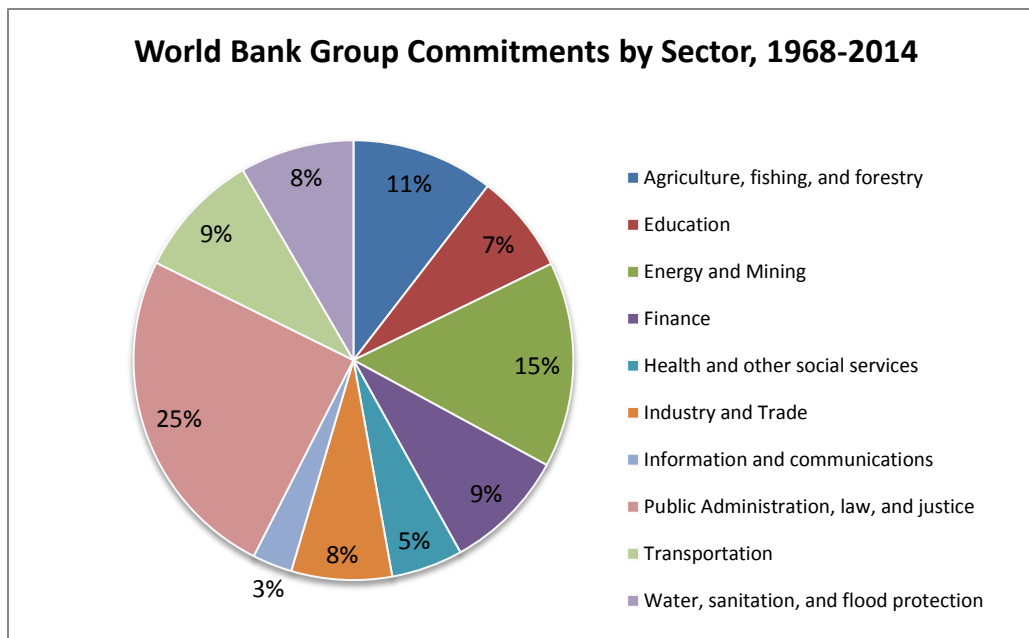
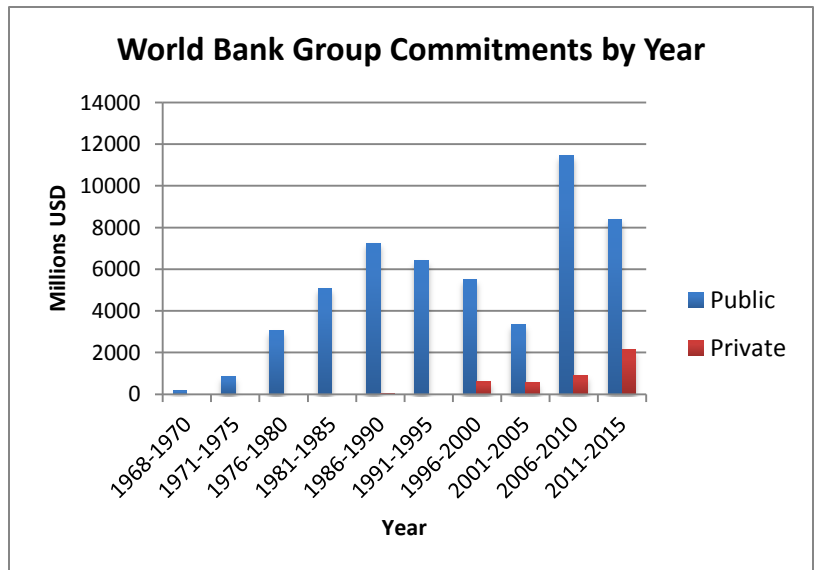
BANK INFORMATION CENTER

The Bank Information Center (BIC) partners with civil society in developing and transition countries to influence the World Bank and other international financial institutions (IFIs) to promote social and economic justice and ecological sustainability. BIC is an independent, non-profit, non-governmental organization that advocates for the protection of rights, participation, transparency, and public accountability in the governance and operations of the World Bank Group and regional development banks.

Portfolio Pinjaman Bank Dunia

Indonesia pertama kali menjadi anggota Kelompok Bank Dunia (WBG) pada April 1967 dan bergabung dengan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD), diikuti dengan keanggotaan dalam Asosiasi Pembangunan Internasional (IDA) dan Korporasi Keuangan Internasional (IFC) pada tahun 1968. Sedangkan keanggotaan pada Badan Garansi Investasi Multilateral baru pada tahun 1988.

Sejak saat itu, Indonesia telah menerima total dana US \$51,6 milyar untuk investasi sektor publik dari IBRD dan IDA dalam bentuk pinjaman investasi, kebijakan pembangunan, dan bantuan teknis baik utang maupun hibah. Sedangkan untuk sektor swasta, negara ini telah menerima total dana sebesar US\$ 4,33 milyar dalam bentuk asuransi resiko politik dari MIGA, juga modal, pinjaman investasi, dan *advisory services* dari IFC. Bagan dibawah mengilustrasikan distribusi pinjaman per waktu da sektor, dan didasari pada data portfolio proyek kelompok Bank Dunia.



Dalam Pipeline

Tabel dibawah menggambarkan proyek-proyek sektor publik di Indonesia yang saat ini sedang menunggu persetujuan Manajemen Senior Bank Dunia, yang berada dalam Ringkasan Operasional Bulanan (*Monthly Operational Summary*)

Project Name	Cost (mUSD)	EA	Board Date	Contact Info
Coral Reef Rehabilitation and Management Program Phase III	47.4	B	01/17/2014	Dr. Agus Dermawan, Director of Marine and Aquatic Resources Conservation, Ministry for Marine Affairs and Fisheries; agusder81@yahoo.com
Coral Reef Rehabilitation and Management Program III	10.0	B	01/17/2014	Dr. Tony Ruchimat, Director, Coasts and Small Islands, Ministry for Marine Affairs and Fisheries; truchimat@yahoo.com
Forest Investment Program: Forest Management Unit Development	17.0	B	09/15/2014	TBD
Sumatra Wildlife Biodiversity	9.0	B	01/30/2015	Mr. Agus Budi Sutito, Head of Species and Genetic Conservation Division, Ministry of Forestry; (62-21) 572-0227
Large Enterprises Energy Efficiency	5.5	F	02/24/2014	TBD
Energy Efficiency Financing	100.0	B	On Hold	Mr. Harjanto, Director, Ministry of Industry; harjantom@kemenperin.go.id
Geothermal Energy Upstream Development	200.0	A	06/10/2014	Narendra Widjajanto, Finance Director CFO, Pertamina Geothermal Energy (PGE); info@pgeindonesia.com
Partnership for Market Readiness	5.7	B	02/28/2014	Dicky Edwin Hindarto, Head, National Climate Change Council; info@dnpi.go.id
Matenggeng Pumped Storage Hydro-Electrical	500.0	A	06/12/2014	Murtaqi Syamsuddin, Director, PLN (Persero); murtaqi@pln.co.id
Poko Hydropower	360.0	A	03/20/2015	TBD
Renewable Energy for Electrification	150.0	B	03/24/2014	Murtaqi Syamsuddin, Director, PT Perusahaan Listrik Negara; murtaqi@pln.co.id
Financial Sector and Investment Climate Reform and Modernization Development Policy Loan Second	300.0	U	03/18/2014	Mr. Robert Pakpahan, Director General of Debt Management, Ministry of Finance; rpakpah@yahoo.com
Lampung Water Supply Guarantee	40.0	B	01/28/2014	Dr. Hi. AZP Gustimigo, Director, Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau; penigustimigo@yahoo.com
PNPM Generasi Program Additional Financing	151.7	B	01/16/2014	Tarmizi Karim, Director General, Village Community Empowerment (PMD); ppkpmid@yahoo.com
Lombok Regional Economic Development	100.0	A	11/20/2014	TBD
Local Government and Decentralization Additional Financing	250.0	B	05/30/2014	T. Lumban Tobing, Deputy Director for Funds; herusubiyantoro@depkeu.go.id

Metropolitan and Urban Development	400.0	A	TBD	Dr. Max Pohan, Deputy Minister, Bappenas; pohan@bappenas.go.id
Ports Modernization	67.0	C	On Hold	Kemal Heryandri, Director, Ministry of Transport; heryandri@yahoo.com
Road Asset Preservation	200.0	B	06/23/2014	Mr. Harris Batubara Batubara, Director of Planning, Ministry of Public Works; harris_batubara@hotmail.com
Urban Solid Waste Management Program	100.0	A	01/16/2014	Ir. Djoko Kirmanto, Minister, Ministry of Public Works; dkirmanto@pu.go.id
PAMSIMAS Support Trust Fund Additional Financing	44.0	B	01/31/2014	Danny Sutjiono, Director of Water Supply Development, Ministry of Public Works; dsutjiono@yahoo.co.id
Water and Sanitation Investment Facility	100.0	B	09/09/2014	Iman Emawi, Director General of Human Settlements, Ministry of Public Works; di_bpck@yahoo.com
Source: World Bank Monthly Operational Summary, February 2014 (http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/WBMOS02Feb2014.pdf)				

Watch List: Forest Investment Program

Indonesia adalah salah satu dari delapan negara terpilih untuk berpartisipasi dalam Program Investasi Kehutanan (FIP). Total komitmen pendanaan untuk Indonesia adalah \$70 juta dalam bentuk hibah dan pinjaman konsesional. *Joint mission* pertama untuk program ini dilakukan pada bulan July dan kemudian Desember 2011. Namun, misi tersebut penuh kekurangan dan proses konsultasi yang buruk.

Pada tanggal 16 Maret 2012, beberapa NGO Indonesia menulis surat pada tim FIP, mengkritisi [draft dari Investment Plan](#). Grup ini kemudian memberikan [komentar dan rekomendasi](#) terhadap draft FIP tersebut pada September 2012. Namun, rencana investasi tersebut tetap mendapatkan [persetujuan dari anggota sub-committee pada pertemuan](#) di Istanbul pada 5 November 2012, dengan catatan yang meminta kepada pemerintah Indonesia dan Bank-bank Pembangunan Multilateral untuk me-review dan menanggapi komentar dari CSO dan organisasi masyarakat adat.

Pada bulan Juni 2013, Dewan Kehutanan Nasional menyelenggarakan sebuah konsultasi/dialog mengenai FIP di Bogor. DKN ditunjuk oleh tim FIP yang terdiri dari Kemenhut, ADB, Bank Dunia dan IFC untuk melakukan konsultasi terhadap dokumen FIP. Hal ini diikuti oleh sebuah [Policy Paper](#) atau Kertas Kebijakan FIP yang dibuat oleh DKN, yang juga menyertakan pandangan dari masing-masing kamar dalam DKN. Dua dari kamar tersebut, yaitu kamar masyarakat dan NGO memiliki posisi yang cukup kuat terhadap FIP: menuntut proses yang lebih baik, menjamin hak tenure dan adat, dan mengimplementasikan keputusan MK no.35 yang mengembalikan hutan adat kepada masyarakat adat. Kedua kamar ini mengetakan bahwa DKN harus menolak FIP jika masalah-masalah tersebut tidak ditanggapi.

Sementara itu, CSO dan masyarakat adat Indonesia juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap proses disain proyek FIP. Masing-masing MDB bertanggung jawab untuk merancang proyeknya sendiri, yang artinya setiap proyek akan mengikuti siklus proyek biasa, prosedur, dan kebijakan safeguard dari masing-masing MDB tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan dari CSO Indonesia mengenai akuntabilitas proses disain dan juga mengenai koordinasi dan sinergi antar lembaga-lembaga tersebut. Sampai saat ini, proses disain proyek tertunda, dan belum ada agenda untuk merancang proyek yang melibatkan masyarakat sipil, apalagi agenda konsultasi, selain dari rapat sosialisasi yang dibuat oleh ADB pada tanggal 25 Februari 2014.

Apa itu Forest Investment Program?

Diluncurkan pada tahun 2009, [Program Investasi Kehutanan \(FIP\)](#) merupakan salah satu program dibawah Strategic Climate Funds (SCF), dibawah payung Climate Investment Fund (CIF), yang dirancang untuk membantu aktifitas REDD+ dan menguatkan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dana perwalian (*Trust fund*) tersebut berfungsi sebagai alat MDBs seperti Bank Dunia untuk menyalurkan hibah dan kredit berbunga rendah kepada negara-negara uji coba (pilot countries), meskipun bersamaan dengan itu usaha untuk menjaring investasi swasta juga dijalankan. Ada delapan pilot countries dibawah program ini: adalah Brazil, Burkina Faso, Democratic Republic of the Congo, Ghana, Indonesia, Lao People's Democratic Republic, Mexico and Peru.

Keputusan mengenai proyek dan negara uji coba FIP dibuat secara konsensus oleh [FIP Sub-Committee](#), yang terdiri dari enam negara kontribusi dan sampai dengan 6 negara penerima. Anggota sub-committee yang sekarang adalah: Australia/Swednia, Denmark/Spanyol, Jepang, Norway, United Kingdom, United States, Brazil, Democratic Republic of Congo, Ghana, Indonesia, Mexico dan Peru. Ada juga observer aktif untuk sub-committee FIP yang termasuk didalamnya adalah representasi dari sekretariat FCPF, Global Environment Facility, UNFCCC dan UN-REDD, dan juga 2 representasi terpilih dari masyarakat sipil, masyarakat adat dan sektor swasta.

Representasi di Bank Dunia

Pengawasan secara keseluruhan Kelompok Bank Dunia sebagai sebuah institusi publik dilakukan oleh Dewan Gubernur (*Board of Governors*), yang anggotanya merepresentasikan masing-masing dari 188 negara anggota Bank Dunia. Para Gubernur yang biasanya diwakili oleh oleh Menteri Keuangan masing-masing negara, bertemu tiap tahunnya pada saat *Annual Meetings*. Sedangkan tanggung jawab untuk melakukan operasi umum, dengan beberapa pengecualian, di delegasikan kepada 25 Direktur Eksekutif (*Executive Directors* /EDs) yang ditunjuk, yang melakukan kerja mereka dari kantor pusat Bank Dunia di Washington DC. Konstituen dari masing-masing Direktur eksekutif tersebut dibentuk berdasarkan *voting power* yang dipegang oleh negara anggota dan ikatan regional. Maka seorang ED bisa merepresentasikan hanya satu negara (misalnya Perancis) sampai 23 negara (misalnya francophone Africa). Pada ED yang menjabat selama dua tahun bertanggung jawab untuk memberikan advis dan melakukan negosiasi dengan pemerintah negara konstituen mengenai proyek dan program, selain juga kebijakan global dan strategi.



Dewan Gubernur yang merepresentasikan Indonesia adalah **Menteri Keuangan H.E. Muhamad Chatib Basri**. Beliau telah berperan sebagai penasihat kebijakan ekonomi selama bertahun-tahun bagi pemerintah dan lembaga-lembaga internasional sebelum menjabat sebagai Menkeu pada tahun 2013.

Kami percaya bahwa kerja kedepan dalam [Country Partnership Framework] dan [Systemic Country Diagnostic] harus berdasarkan kepemilikan negara. Kepemilikan negara berarti komitmen. Pengalaman kami menunjukkan bahwa sebarang sumber daya yang dikucurkan ke sebuah negara akan sia-sia jika tidak ada rasa kepemilikan.

-H.E. Muhamad Chatib Basri, [2013 WBG/IMF Annual Meetings](#)

Sedangkan untuk Dewan Direksi, Indonesia direpresentasikan oleh **Sundaran Annamalai, the Executive Director of Malaysia**, yang juga mewakili Brunei Darussalam, Burma, Fiji, Lao PDR, Nepal, Singapura, Thailand, Tonga dan Vietnam. Sebelum bergabung dengan Bank Dunia pada tahun 2012, Dr. Annamalai bekerja untuk Kementerian Keuangan Malaysia, yang sekarang ini menjadi tempat beliau melapor sebagai ED Bank Dunia. Para ED dibantu oleh sejumlah staf penasihat dari negara-negara lain dalam konstituensinya, seperti misalnya penasihat Kristiyanto dari Indonesia

Perlu dicatat bahwa isu-isu spesifik sehubungan dengan sebuah negara dapat dilaporkan ke kantor ED, karena setiap kantor mempunyai staf yang berspesialisasi terhadap isu-isu Asia Timur dan Pasifik.



Spotlight: World Bank Safeguards Review

Safeguards dalam ancaman

Bank Dunia saat ini sedang melakukan proses meninjau kembali dan memperbaiki 10 kebijakan yang dikenal sebagai safeguard policies. Hal ini adalah bagian dari proses reformasi kebijakan operasional yang lebih luas yang bermula pada Juli 2012. Fase pertama dari tiga tahap proses konsultasi dimulai pada bulan Oktober 2012, diikuti dengan dikeluarkannya “approach paper” dan berakhir pada April 2013. Fase kedua konsultasi seharusnya dimulai pada akhir 2013, namun prosesnya tertunda karena Bank Dunia sedang mengadopsi sebuah strategi bisnis baru dan karena keluarnya sejumlah staf tim safeguards review.

Perubahan-perubahan ini menggaris-bawahi beberapa ancaman utama dalam proses yang dapat melemahkan system safeguards. Disaat Bank Dunia menjalankan strategi bisnisnya yang baru, proses reorganisasi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana safeguards dapat masuk dalam model bisnis baru dan apakah pemotongan anggaran secara keseluruhan akan mengurangi jumlah staf yang menangani safeguards dan akuntabilitas. Strategi yang baru ini kemungkinan akan juga merubah pola dari persetujuan proyek, meningkatkan penggunaan instrument pinjaman baru yang tidak terjangkau oleh safeguards yang sekarang, dan menambah portfolio sektor swasta.

Apa itu kebijakan safeguards Bank Dunia?

World Bank Safeguard Policies adalah kumpulan dari sepuluh ketentuan lingkungan, sosial dan legal yang dirancang untuk mengidentifikasi dan mencegah dampak negatif yang disebabkan oleh proyek sektor publik yang didanai oleh Bank Dunia. Misalnya, jika pemerintah menginginkan Bank Dunia untuk membiayai konstruksi jalan, maka Bank harus melihat juga dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh proyek ini – apakah masyarakat akan tergusur? Apakah habitat natural akan rusak? Dlsb – dan melakukan mitigasi berdasarkan panduan dalam kebijakan safeguards yang ada.

Kebijakan yang ada sekarang adalah (1) *Environmental Assessment*, (2) *Natural Habitats*, (3) *Forests*, (4) *Pest Management*, (5) *Physical Cultural Resources*, (6) *Involuntary Resettlement*, (7) *Indigenous Peoples*, (8) *Safety of Dams*, (9) *International Waterways*, and (10) *Disputed Areas*. Bank Dunia juga melakukan uji coba terhadap penggunaan system negara peminjam (Country system) di beberapa negara anggota dan Performance Standard UFC untuk proyek Kemitraan publik-swasta

Selain itu, terdapat perbedaan antara Dewan Direktur Utara-Selatan yang sudah berlangsung cukup lama, seperti perbedaan prioritas kebijakan Antara AS dan EU, dan di pihak lain Cina dan Brazil, terutama menyangkut persoalan penggunaan system negara (*country system*). Dengan masuknya Mark King dari EBRD untuk mengepalai WB safeguards review, ada juga kekhawatiran bahwa kerangka kerja safeguards yang baru akan mengadopsi model EBRD, yang memiliki banayak persamaan dengan *Performance Standard IFC*. Pada masa lalu masyarakat sipil telah mengutarakan bahwa terdapat gap antara standar IFC dan EBRD yang tidak dapat diterapkan dalam peminjaman sektor publik, sehingga jika ini diberlakukan akan melemahkan kebijakan tersebut.

Telah diantisipasi bahwa draf pertama dari kerangka kerja kebijakan safeguards yang terintegrasi dan tahap konsultasi akan dimulai pada pertengahan tahun ini. Sementara itu NGO dari berbagai negara Utara dan Selatan terus-menerus

mengawasi dan berhubungan dengan staf Bank Dunia untuk proses review ini dan akan berpartisipasi dalam konsultasi fase kedua untuk memastikan bahwa safeguards yang baru akan lebih kuat, komprehensif dan dapat diimplementasikan dengan lebih baik.

Indonesia dan Safeguards

Selama bertahun-tahun masyarakat sipil di Indonesia telah berjuang melawan dampak negatif dari proyek-proyek Lembaga-lembaga Keuangan Internasional (LKI) dan bergabung dengan komunitas global untuk menuntut safeguards yang lebih kuat, termasuk kepada Bank Dunia. Review safeguards ini akan mempengaruhi cara kerja pemerintah dan investor internasional. Contohnya, akan mempengaruhi disain dari proyek-proyek pembangunan dan akan merubah cara-cara institusi internasional dapat bertanggung gugat. Dengan meningkatnya portfolio dari Pinjaman Kebijakan Pembangunan (DPL) dan bentuk pinjaman investasi lainnya di Indonesia, yang secara konsisten berada dalam peringkat lima besar klien Bank Dunia, penting bagi masyarakat sipil Indonesia untuk melakukan intervensi dalam proses review ini, untuk memastikan bahwa investasi Bank Dunia tidak membahayakan masyarakat dan lingkungan.

Beberapa dari CSO Indonesia telah terlibat dalam proses safeguards review pada tahap pertama konsultasi di Jakarta pada tanggal 21-22 Maret 2013, pada saat Bank Dunia mengadakan tiga pertemuan terpisah untuk pemerintah, sektor bisnis dan CSO. Baru-baru ini, pada bulan Maret 2014, serikat pekerja di Indonesia menyerahkan sebuah kertas rekomendasi kepada Bank Dunia yang meminta agar Bank mengadopsi safeguards pekerja yang komprehensif yang dapat memastikan agar Core labor Standard (CLS) dan hak-hak pekerja lainnya terlindungi di semua proyek yang dibiayai oleh kelompok Bank Dunia.

Apa yang baru: Inisiatif Masyarakat Sipil

Rekomendasi Safeguard Pekerja: Pada tanggal 6 Maret 2014, Serikat Pekerja Indonesia, bergabung dengan ITUC/Serikat Global, *Solidarity Center* dan organisasi dan individu lainnya meminta untuk dimasukkannya safeguard pekerja yang berlaku untuk semua pinjaman kelompok Bank Dunia. Mereka juga meminta agar konsultasi tahap kedua nantinya akan memasukkan agenda dialog dengan pemimpin-pemimpin serikat pekerja di Jakarta setelah draf pertama dari kebijakan safeguards dibuka untuk publik. Untuk lebih jelasnya mengenai rekomendasi dan riset mengenai kondisi pekerja dibawah investasi IFC di Indonesia, hubungi Willy Balawala, Program Officer, Solidarity Center - Indonesia Office di wbalawala@solidaritycenter.org.

Workshop Deforestasi dan Hak Masyarakat Hutan: Forest Peoples Programme (FPP) dan bekerjasama dengan PUSAKA menyelenggarakan sebuah workshop internasional pada tanggal 9-14 Maret 2014 yang kemudian mengeluarkan [Palangkaraya Declaration on Deforestation and the Rights of Forest Peoples](#). Acara dan deklarasi ini merupakan sebuah langkah penting untuk mengukuhkan hak-hak masyarakat adat dan masyarakat hutan dan usaha-usaha di tingkat global, nasional dan lokal dalam melawan krisis deforestasi.

CSO Indonesia meninjau kinerja CIF di Indonesia: Lima tahun setelah dibentuknya Dana Investasi Iklim (CIF), ke-enam MDBs didalamnya berinisiatif untuk melakukan evaluasi terhadap kedua pasang kelompok pendanaan dibawah CIF: Clean Technology Fund (CTF) dan Forest Investment Program (FIP). Pemerintah Indonesia mendapatkan akses terhadap kedua fasilitas pendanaan tersebut. Menanggapi hal tersebut, CSO Indonesia yaitu debtWATCH Indonesia, HuMA and BIC diantaranya, menginisiasikan sebuah evaluasi alternative versi CSO. Meskipun banyak area dari analisis mereka bersinggungan dengan [approach paper evaluasi CIF](#), evaluasi versi CSO lebih berfokus untuk melihat seberapa transformatifkah program dan proyek sehubungan dengan kedua pendanaan tersebut pada tahap perencanaan dan implementasi awal; bagaimana safeguards, akuntabilitas, FPIC, ketidak-adilan gender dan hal-hal rentan lainnya ditangani; dan bagaimana donor-donor pembiayaan iklim menerapkan koordinasi dan kepemilikan negara (*country ownership*) dan juga mengharmnisasikan agenda mereka dengan prioritas mitigasi iklim Indonesia. Laporan tersebut direncanakan akan selesai pada bulan Mei, sebelum [CIF Partnership Forum](#) pada tanggal 23-24 Juni 2014.